

Pemko Suratikan Kemendag

Minta Kuota Impor Beras Khusus Batam

BATAMKOTA (BP) - Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah menyuratikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia terkait

permintaan kuota impor beras khusus Batam. Langkah Pemko Batam tersebut untuk mengatasi kurangnya persediaan hingga menyebabkan

harga beras melambung.

"Dua hari lalu sudah diajukan (suratikan Kemendag). Kami harap Batam diberi izin impor," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam Zarefriadi, Kamis (1/3) siang.

Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Batam ini menuturkan, jika Kemendag memberikan izin impor akan sangat membantu mengatasi permasalahan pangan di Batam, baik segi harga maupun ketersediaannya di pasaran. "Impor itu akan diberlakukan ketika situasi sulit.

Misal supali dari daerah lain terganggu, apa akibat cuaca, gagal panen, dan lain-lain," ucap dia.

Ditanya langkah sementara Pemko Batam sembari menunggu keputusan Kemendag, Zaref mengaku tidak ada. Sebab ia mengklaim saat ini harga bahan pokok di pasaran sudah mulai normal. Dengan demikian tak ada lagi kendala berarti dan pemerintah cukup memantau harga.

Dia mengaku, sejauh ini program pemerintah dan Bulog cukup berhasil menekan gejolak harga. "Sekarang sudah normal. Jadi, usaha pemerintah sebenarnya sudah berhasil," ujarnya.



JADWAL SALAT

Batam Dan Sekitarnya

SUBUH	ZUHUR	ASHAR	MAGHRIB	ISYA
04:58	12:18	15:32	18:21	19:30



KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH BATAM BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

JADWAL SAMSAT KELILING

NO.	TANGGAL	BUS SAMLING	MOBIL SAMLING	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LIBUR
1.	05 MAR - 10 MAR 2018	KEPRI MALL	TOP 100 BENGKONG	SENIN - KAMIS JUMAT SABTU ISTIRAHAT ISTIRAHAT JUMAT	01 MAR 2018 - MINGGU
2.	12 MAR - 16 MAR 2018	MC. DONAL JOODH	TIBAN CENTER	SENIN - KAMIS JUMAT SABTU ISTIRAHAT ISTIRAHAT JUMAT	17 MAR 2018 - HARI RAYA NYEPY 18 MAR 2018 - MINGGU
3.	19 MAR - 24 MAR 2018	NAGDYA HILL	GIANT BENGKONG	SENIN - KAMIS JUMAT SABTU ISTIRAHAT ISTIRAHAT JUMAT	25 MAR 2018 - MINGGU
4.	26 MAR - 31 MAR 2018	HUTEL UTAMA	BOTANIA	SENIN - KAMIS JUMAT SABTU ISTIRAHAT ISTIRAHAT JUMAT	30 MAR 2018 - BUKA ISALAMUDIN

JADWAL SAMSAT BERGERAK

NO.	TANGGAL	NAMA KECAMATAN	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LIBUR
1	01 MARET - 09 MARET 2018	SEKUPANG	SENIN - JUMAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT JUMAT	10 MARET - SABTU 11 MARET - MINGGU
2	12 MARET - 16 MARET 2018	BENGKONG	SENIN - JUMAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT JUMAT	17 MARET 2018 - HARI RAYA NYEPY 18 MARET 2018 - MINGGU
3	19 MARET - 23 MARET 2018	SEI. BEDUK	SENIN - JUMAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT JUMAT	24 MARET 2018 - SABTU 25 MARET 2018 - MINGGU
4	26 MARET - 29 MARET 2018	NONGSA	SENIN - JUMAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT JUMAT	30 MARET 2018 - WAFAT ISA ALMASHI 31 MARET 2018 - SABTU

JADWAL SAMSAT ANTAR PULAU

HARI / TANGGAL	SAMSAT ANTAR PULAU	WAKTU PELAYANAN	KETERANGAN LIBUR
SETIAP RABU (TGL 07, 14, 21, DAN 28 MARET 2018)	BELAKANG PADANG (KANTOR KELURAHAN TANJUNG SARI)	RABU - ISTIRAHAT	09.00 - 14.30 WIB 12.00 - 13.00 WIB

Pemko Suratikan Kemendag

Sambungan dari hal 9

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sangat mendukung rencana Pemko Batam menyuratikan Kemendag agar kran impor beras di Batam dibuka. Sebab impor dinilai salah satu solusi tepat dan cepat untuk mengatasi kekurangan stok beras di Batam.

"Iya, impor beras itu salah satu solusi," ujar Kepala BI Kantor Perwakilan Provinsi Kepri Gusti Raizal Eka Putra kepada Batam Pos di Hotel Harris Resort Batamcentre, Rabu (28/2) lalu.

Pedagang Kesulitan Jual Beras

Sejumlah pedagang beras di pasar tradisional di Batam mengaku kesulitan menjual beras. Hal itu, lantaran harga beras yang sangat mahal dan membuat warga enggan membeli beras dalam jumlah banyak. "Akhir-akhir ini sepi pembeli," ujar Rahmatio, pedagang Pasar Fanindo, Ba-



F. DALIL HARAHAP/BATAM POS
Zarefriadi

tuaji kemarin.

Dia mengatakan, akibat mahalnnya harga beras sekarang, warga yang biasa membeli dalam jumlah banyak beralih dan hanya bisa membeli per kilogram (kg) saja. Harga beras kiloan dijual di kisaran Rp 12 ribu hingga Rp 13 ribu per kg. "Paling tinggi warga beli lima kilo saja," sebutnya.

Harga beras selama dua bulan belakangan ini sangat tidak terkendali. Saat ini beras pre-

mium dipasarkan harganya Rp 300 ribu per karung (isi 25 kg). Sementara harga beras di bawah Rp 200 ribu dan Rp 100 ribu sudah tidak ada lagi. "Kecuali beras Bulog harganya masih Rp 8.000 per kilonya," ucapnya.

Beras Bulog yang dijual itu pun memiliki kualitas cukup rendah. Namun karena kondisi ekonomi warga yang tidak mampu, banyak yang tidak mempersoalkannya. "Karena kebutuhan pokok, mereka tetap beli," jelasnya.

Pedagang lainnya, Sulaiman mengaku karena kenaikan harga beras yang sangat tinggi, tak jarang ia dan pembeli terlibat cekcok mulut. "Banyak yang ngeluh, nanya ini itu, kenapa mahal sekali," ujar Sulaiman menirukan pembeli.

Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah untuk segera mengatasi persoalan tersebut, sebab jika berlarut-larut harga beras akan semakin mahal. "Pasokan beras pun terbatas," jelas pedagang di Pasar Sagulung ini. **(une/adi)**

Gelap Gulita, Warga Minta Penerangan Jalan

SEIBEDUK (BP) - Mulusnya Jalan S Parman jalur baru, yakni mulai dari Pintu Empat hingga di depan Perumahan Nusa Indah Seibeduk belum diimbangi dengan keselamatan pengendara, hal itu lantaran minimnya penerangan yang ada di ruas jalan tersebut.

Karena kondisi itu, pengendara pun harus melintas dengan kondisi gelap gulita saat malam hari. Padahal jalan yang baru selesai dibangun dua bulan yang lalu itu merupakan akses yang banyak dilalui pengendara. Minimnya penerangan ini sudah banyak dikeluhkan warga. Sumiati, pekerja di PT Schneider di Mukakuning mengaku cukup was-was saat melintas. Ia pun harus memelankan kendaraannya agar jalan terlihat jelas.

"Maunya secepatnya di pasang lampu penerangan," ujar warga Perumahan Puri Agung II ini, Senin (26/2).

Dia mengatakan kondisi gelap itu cukup membahayakan pengendara, terlebih pengendara suka melawan arus. "Kadang ada pengendara yang

melawan arus dan lampu motornya mati," katanya.

Keluhan serupa juga disampaikan Yunita, warga Perumahan Bidaayu, Mangsang. Ia meminta pemerintah untuk secepatnya memasang lampu, agar pengendara yang lewat tidak lagi cemas karena gelap.

"Rawan kejahatan juga," ucapnya.

Selain penerangan jalan, ia meminta Pemerintah Kota Batam menyegerakan pemasangan marka jalan. Karena ketiadaan marka membuat lalulintas di jalan baru ini kerap dilanggar.

Sebelumnya, Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM) SDA Suratno mengungkapkan, pemasangan lampu pada jalur baru belum dianggarkan tahun 2018 ini. Ia mengaku lampu jalan merupakan tugas Pemko Batam pada jalan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepri itu. "Tahun ini belum, kami lakukan bertahap. Masih tahap usulan semua, mungkin dianggarkan 2019," kata Suratno. (une)

Tiga Sekolah Masih Numpang

BATAMKOTA (BP) - Peningkatan infrastruktur pendidikan di Kota Batam, tergolong lambat. Buktinya, sampai saat ini masih ada sekolah yang menjalankan aktivitas belajar mengajar dengan menumpang ke sekolah lain. Sedikitnya ada tiga sekolah di Batam yang masih menghadapi permasalahan tersebut, karena belum memiliki gedung sekolah sendiri.

Ketiga sekolah tersebut adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 008 Batuaji, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 56 Batam di Sekupang, serta SMPN 57 Batam juga berlokasi di Sekupang.

"Selama beberapa tahun terakhir ini, ketiga sekolah tersebut terpaksa menjalankan proses belajar mengajar dengan menumpang ke sekolah lain karena belum memiliki bangunan sekolah sendiri," kata anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Riky Indrakari, Kamis (1/3).

SDN 008 Batuaji misalnya, sudah empat tahun menumpang di gedung milik SDN 002 Batuaji. SDN 008 memimjam tiga ruang kelas di SDN 002 Batuaji. Dua lokal dijadikan kelas untuk kegiatan belajar mengajar, sedangkan satu ruangan lagi untuk majelis

guru. Parahnya, dengan kondisi tersebut proses belajar terpaksa dilakukan tiga shift.

Sementara SMP 56 Batam juga terpaksa menumpang di gedung SDN 010 Tiban Kampung, sedangkan SMPN 57 menumpang di SDN 003 Patam Lestari.

"Informasi dari Disdik (Dinas Pendidikan) Batam, rencana pembangunan gedung SMP 56 dan 57 sudah selesai prosesnya. Bahkan sudah dianggarkan di tahun ini. Baik pembangunan gedung SMPN 56 dan 57 dianggarkan Rp 4,3 Miliar. Pembangunannya dilakukan secara bertahap," terangnya.

Riky juga berharap agar anggaran yang sudah disetujui tersebut segera direalisasikan untuk pembangunan sekolah. "Jangan sampai kena rasionalisasi lagi. Apalagi kedua sekolah ini sudah dua tahun tak punya bangunan dan menumpang di SD," terang dia.

Sementara itu, untuk SDN 008 Batuaji masih menemui persoalan lahan. DPRD sudah mengusulkan agar lahan belakang Kantor Lurah Buliang, tepatnya berbatasan dengan RT 06 dan RT 07 RW 22, Puri Buana Indah. Lahan ini dinilai cocok karena berdekatan

dengan SD 002. Lahan itu awalnya diperuntukan untuk Kantor Lurah Buliang, tapi sekarang sudah memiliki bangunan.

"PL-nya sudah ada. Mudah-mudahan ini bisa segera direalisasikan," tuturnya.

Anggota Komisi IV DPRD Batam lainnya, Bobi Aleksander Siregar menyebutkan, perencanaan pembangunan sekolah oleh Disdik harus matang. Jangan lagi ketika sekolah dibangun tapi lahannya tidak ada. Banyaknya sekolah menumpang di Batam saat ini, kata dia, tidak lepas dari perencanaan amburadul tersebut, sehingga yang menjadi dikorbankan adalah siswa.

"Artinya Disdik jangan nekat (buka sekolah baru). Ada usulan masyarakat, langsung buka sekolah, tapi lahannya belum jelas," sesalnya.

Dia melihat selama ini Disdik hanya menerima bersih saja. Baru ketika ada permasalahan seperti ini menjadi pusing mencari lahan sekolah. Harusnya di pertegas dulu lahan itu, baru direkomendasikan. Kalau sekarang kan terbalik. Direkomendasikan dulu untuk membangun sekolah, dimana lahannya bisa belakangan," jelas Bobi. (rng)

Rp 3,9 Miliar untuk Pelabuhan dan Speedboat

ADIANSYAH, Batamkota

BATAM mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dengan total anggaran sekitar Rp 3,9 miliar. Dengan anggaran ini, Pemko berencana akan membangun pelabuhan rakyat di Pulau Airsaga Rempang dan pengadaan lima *speedboat* untuk layanan antarpulau.

"Pelabuhan Rp 3,4 miliar dan untuk *speedboat*-nya Rp 550 juta," ucap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam

Yusfa Hendri, Kamis (1/3).

Ia menyampaikan bahwa proyek ini untuk mendukung kegiatan harian dan ekonomi masyarakat pulau. Kedua kegiatan pengadaan ini dalam proses lelang. "Kami perkirakan pelabuhan Mei sudah mulai dikerjakan, sekarang proses lelang. Begitupun pengadaan *speedboat*-nya kami sedang persiapan juga," paparnya.

Soal pelabuhan, ia mengatakan, sejatinya Batam yang merupakan daerah kepulauan butuh banyak pelabuhan. Na-

mun ia memahami pembangunan harus dilakukan bertahap sesuai dengan jumlah bantuan dari pemerintah pusat. Mantan Kepala Dinas Pariwisata ini menyebutkan bahwa Pemko Batam berharap dana pusat untuk pembangunan pelabuhan pulau yakni mengandalkan bantuan DAK.

"Sudah diajukan juga pelabuhan untuk di Pulau Karas, Nongsa dan Sekanak Raya, Belakangpadang. Mudah-mudahan tahun depan terealisasi," ucap dia.

Tak hanya dua pelabuhan ini, ada banyak titik kebutuhan pelabuhan di pulau-pulau lain. Untuk itu tahun ini pihaknya akan menggelar kajian kebutuhan pelabuhan, kegiatan ini diiringi dengan kajian kebutuhan Jembatan penyebrangan Orang (JPO) se Batam. Selain infrastruktur pelabuhan, armada angkutan kini juga sudah mulai tersedia, di laut kini tersedia satu kapal, enam unit *speedboat* dan tambahan pengadaan tahun ini lima unit *speedboat*.

"Daerah kita ini kan kepulauan, perlu koneksi antarpulau, pelabuhan itu kalau di darat ibarat haltenya," ucap dia.

Tak hanya pelabuhan untuk mendukung kegiatan menggunakan dana yang sama, tahun lalu juga dibangun pelabuhan di Pulau Putri untuk mendukung potensi wisata.

"Balai Wilayah Sungai KemenPUPR sedang menimbun pasir sekaligus akses jalan di pulau itu, pelabuhannya sudah tahun lalu," pungkasnya.***

Penundaan Perda Pajak Bisa lewat Diskresi

BATAMKOTA (BP) - Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Uba Ingan Sigalingging menilai, secara teknis Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak wajib dijalankan. Namun begitu ada diskresi, yaitu keputusan atau tindakan yang ditetapkan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan secara konkret.

Keputusan ini terkait peraturan undang-undang yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas. "Kalau misalnya mau ditunda harus lewat diskresi. Tapi alasannya pun harus jelas," kata Uba, Kamis (1/3).

Menurut dia, menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi di sini adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, seperti Wali Kota. "Intinya ada aturan hukum yang menjadi dasar dari pelaksanaan di lapangan," tuturnya.

Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah sendiri

merupakan produk bersama DPRD dan Pemko Batam. DPRD dan Pemko menyetujui kenaikan pajak daerah karena melihat geliat pajak yang masuk ke kas daerah tak sebanding dengan potensi sebenarnya.

Selain itu, kenaikan pajak hanya prioritas di sektor hiburan seperti pajak diskotek, panti pijat, spa, pajak permainan ketangkasan atau gelper, pajak bowling, reklame rokok, dan parkir. "Yang naik sifatnya insedentil atau tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau restoran, hotel atau yang lain kan tak naik," sebutnya.

Uba mencontohnya, ketika orang ingin spa, massage atau ke diskotek sifatnya hanya hiburan dan kesenangan. "Jadi jangan dibilang ketika pajak naik, ekonomi makin sulit. Bisa dibedakan dengan kenaikan tarif listrik kemarin, yang memang berdampak langsung kepada seluruh masyarakat. Kalau ini kan tak semua orang ke tempat hiburan," jelasnya.

Selain itu, semangat menaikkan pajak hiburan untuk memaksimalkan pendapatan daerah. "Dan kenaikan pajak

hiburan ini lazim dilakukan di semua daerah," tambahnya.

Uba juga menyoroti apa yang disampaikan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Batam. Menurutnya, kenapa pada saat listrik naik Kadin Batam tidak minta ditinjau kembali. Sementara ketika pemerintah menaikkan pajak hiburan ia berteriak seakan-akan kenaikan pajak tersebut berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

"Artinya jangan melihat secara kaca mata kuda saja. Seharusnya kalau memang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sebelum kenaikan tarif listrik lalu," sesalnya.

Anggota Komisi II DPRD Batam lainnya, Mulia Rindo Purba mengatakan, perda yang sudah diundangkan tidak bisa ditunda penerapannya. Apalagi perda ini berhubungan dengan APBD. Sehingga mau tidak mau aturan yang ada di perda wajib untuk dijalankan.

"Kita tahu ekonomi Batam lemah. Tapi satu sisi Pemko juga komit. Bukan berarti ekonomi sulit, kita tunda kenaikan pajak. Nanti ekonomi bagus, naik lagi. Tak bisa begitu," tegasnya. (rng)

Gustian: Pengusaha Antre Mau Buka THM

BATAMKOTA (BP) - Kabar banyaknya Tempat Hiburan Malam (THM) di Batam seperti diskotek yang tutup, dibantah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-TPSP) Batam Gustian Riau. "Memang ada yang tutup total, itupun hanya satu saja. Sedangkan THM lainnya seperti kafe ataupun pujasera yang tutup itu sifatnya hanya sementara saja," kata Gustian, kemarin.

Menurut dia, tutup sementara itu hanya menunggu sampai kondisi perekonomian di Batam kembali pulih. Itupun, kata dia, jumlahnya tak banyak dan hanya beberapa saja. "Ada juga THM seperti pujasera dan kafe yang tutup karena mereka lagi merelokasi tempatnya agar lebih bagus lagi," paparnya.

Bahkan, sambung dia, meski kondisi perekonomian di Batam lesu namun masih banyak juga pengusaha yang sudah antre mengajukan izin membuka usaha THM di Batam. "Ada yang sudah keluar izinnya, ada juga yang tunggu daftar antre," ujarnya.

Mayoritas, kata Gustian, pengusaha itu akan membuka usaha seperti karaoke keluarga, kuliner seperti pujasera serta kafe. "Artinya kan di Batam ini masih ada harapan untuk bangkit," ujar Gustian.

Gustian mengatakan, pihaknya mengetahui hal itu karena belum lama ini turun ke lapangan melakukan pengawasan terhadap THM se-Batam. Sekaligus, memanggil seluruh pemilik THM untuk memastikan apakah benar kabar tentang banyaknya THM di Batam menutup usahanya. "Mayoritas pemilik THM mengeluhkan sepiunya tingkat pengunjung. Apalagi, *cost* pengeluaran operasional dengan pendapatan jauh timpang," paparnya.

Agar geliat THM kembali ramai di Batam dan hidup lagi, Gustian akan memberikan kemudahan kepada investor yang akan buka THM. "Kami akan gencarkan sosialisasi. Seperti ke Kampung Bule. THM di sana memang masih eksis buka, tapi memang kondisinya lagi sepi," ujarnya. (gas)

Wali Kota Minta Bantuan Kementerian PUPR

Lanjutkan Pembangunan Jalan Sekupang-Batuaji

YULITAVIA, Sekupang

WALI Kota Batam Muhammad Rudi mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Diponegoro atau dari Sekupang menuju Batuaji ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Bahkan, Rudi mengaku pernah menyampaikan permintaan itu kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimul-

jono. "Kemarin saya jumpa beliau dan saya sampaikan soal jalan ini (Sekupang-Batuaji)," kata Rudi saat membuka Musrenbang di Hotel Vista Batam, Kamis (1/3).

Ia menyebutkan, jalan tersebut sebelumnya dibangun oleh Provinsi Kepri, namun sudah beberapa tahun ini tidak ada kelanjutannya. Informasi yang didapatkan, jalan itu sudah dilimpahkan

ke negara sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. "Besok (hari ini, red) beliau akan datang ke Batam. Saya akan jemput langsung," sebut Rudi.

Ia berharap, pemerintah pusat bisa membantu Pemerintah Kota Batam dalam membangun infrastruktur, terutama jalan. Jika jalannya sudah lebar dan bagus, ini akan menjadi salah satu fak-

tor dalam memajukan dunia pariwisata.

"Dua tahun kami memimpin, banyak hal positif yang sudah dirasakan masyarakat karena pembangunan yang kami lakukan," tambah mantan anggota DPRD Batam ini.

Selain jalan Sekupang menuju Batuaji, Rudi juga berencana melakukan pelebaran jalan dari arah Batamcenter menuju Simpang Mukakuning,

tahun depan. Pelebaran ini dilakukan karena tingkat kemacetan yang sudah cukup parah akibat tingginya mobilisasi kendaraan di jalur tersebut.

"Itu sudah macet sekali, makanya akan kami lebarkan juga tapi yang dari Batamcenter menuju Mukakuning saja dulu. Yah, bertahaplah," ucapnya.

Ia menambahkan, rencana Pemko Batam untuk membangun *ring road* atau jalan lingkaran dari Sekupang

menuju Jodoh, untuk saat ini belum bisa terealisasi karena berbagai kendala. "Ternyata bangunnya enggak mudah, jadi belum jadi jalan tembus itu," sebutnya.

Sebagai penggantinya, tahun depan Pemko Batam mencoba untuk menata jalan yang ada di Tiban Princes, Sekupang.

"Nanti kami akan tambah lajurnya hingga menuju ke arah laut. Semoga ini bisa menjadi awal untuk membangun *ring road* nantinya," tutup Rudi.***



F. CECEP MULYANA/BATAM POS
Muhammad Rudi